

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil kesimpulan mengenai kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan sebagai berikut :

1. Penyimpulan akhir mengenai proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan bahwa proses kolaborasi yang diselenggarakan berjalan cukup baik namun belum optimal karena masih ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan.
 - a. Dalam tahap ini telah dilakukan dialog tatap muka *stakeholder* yang terlibat, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Kelurahan dan masyarakat. Dialog tatap muka ini dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang menghasilkan kesepakatan, dan dalam komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat berjalan cukup baik. Dalam prosesnya kepercayaan antar *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi ruang terbuka hijau mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan telah terbentuk dan cukup baik, melalui komunikasi dan koordinasi yang cukup intens dan rasa profesionalitas. Hal ini dapat dilihat melalui masing-masing *stakeholder* menunjukkan kesungguhan dengan mengikuti apa yang ditetapkan dalam kesepakatan, serta memahami tugas dan fungsinya dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau ini mengikuti apa yang ditetapkan. Saling berbagi pemahaman antara Dinas Lingkungan Hidup,

Bapelitbangda dan Kelurahan serta masyarakat terkait visi/misi, tujuan dan juga informasi telah dilakukan berjalan cukup baik. Penyelarasan pemahaman tercemin dalam bentuk penyatuan tujuan dan informasi yang telah dilakukan oleh antar *stakeholder* yang terlibat saat rapat maupun via *whatsapp*, hal ini membuat minim hambatan. Hasil sementara dapat dilihat dari *feedback* masyarakat yang bersifat positif, ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan sudah mulai lebih bersih dan terawat dan ada beberapa penambahan fasilitas berupa lampu, tempat duduk dan fasilitas lain, *feedback* tidak datang dari masyarakat, pemerintah juga memberikan *feedback* melalui penilain dan juga evaluasi dari laporan Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian diserahkan kepada KLHK.

- b. Pada tahapan *face to face dialogue* berjalan kurang optimal karena proses komunikasinya lebih mengandalkan komunikasi secara *online* atau daring, selain itu partisipasi dan keaktifan dari organisasi pemerintah ini tidak diikuti oleh masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kesadaran, menjaga dan mengelola ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan Lamongan membuat kurang optimalnya hasil dari kolaborasi ini, hal terakhir ialah terlepas dari *feedback* positif, masyarakat merasa perlu adanya pengembangan lebih lanjut pada beberapa ruang-ruang terbuka hijau di Kota Lamongan
2. Kesimpulan dari faktor pendorong dan penghambat dalam proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan sebagai berikut :
 - a. Suksesnya kolaborasi merupakan kemampuan bertindak secara kolektif. Kemampuan bersama dapat dikatakan faktor pendukung meliputi

kesepakatan procedural dan institusional, pengetahuan dan kepemimpinan. Adanya kebijakan pedoman penyediaan, perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau bagian wilayah Kabupaten Lamongan seperti UU Nomor 26 Tahun 2007, PERMEN PU No 5/PRT/M/2008 Peraturan Bupati No.32 Tahun 2013 menjadi faktor pendukung terlaksananya ruang terbuka hijau, karena dalam pelaksanaannya ada landasan hukum yang mengaturnya. Kelancaran proses kolaborasi ini juga berjalan cukup baik karena didukung determinasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam pendistribusian informasi juga telah berjalan cukup antar Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan. Di sisi lain LSM, Masyarakat, swasta ataupun organisasi pemerintah lain juga mendapat informasi ini karena terbuka untuk publik melalui *website* dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup.

- b. Beberapa hal yang menghambat kolaborasi, faktor-faktor tersebut seperti faktor struktur sosial, faktor kultural dan faktor kepentingan pemerintah yang bisa menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi Dalam proses komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* masih mengandalkan komunikasi secara *online* atau daring sehingga kurang optimalnya proses kolaborasi karena dapat terhambatnya perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau. Adanya ketergantungan juga menjadi penghambat hal ini diakibatkan kurangnya faktor ketersediaan sumber

daya berupa anggaran, fasilitas dan SDM, mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda sehingga hasil yang didapat belum optimal. Faktor penghambat terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat, dalam bentuk kesadaran dan kepedulian dapat menjadi hambatan dalam mencapai kolaborasi yang optimal

3. Temuan lain dalam penelitian ini hubungan yang awalnya menjadi penghambat dalam kolaborasi karena adanya hierarki, dalam penelitian ini menjadi faktor pendukung karena pada hubungan tersebut tidak ditemukan hierarki serta para stakeholder yang terlibat dominan pada tugas dan fungsinya masing-masing. Temuan lain yaitu ada pihak swasta menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam proses kolaborasi ruang terbuka hijau di Kota Lamongan. Dukungan berupa tanah hibah yang sekarang menjadi taman dan dana CSR yang sangat berpengaruh pada aspek anggaran yang mengalami keterbatasan sehingga pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan berjalan cukup baik, Temuan lain juga berupa adanya tim gabungan TRC yang menangani situasi darurat, tim gabungan ini terbentuk dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Adanya tim juga cukup membantu menangani hal-hal yang darurat seperti terdapat hambatan tak terduga berupa cuaca yang kerap kali membuat pohon tumbang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan peneliti memberikan rekomendasi dan saran atas kondisi temuan penelitian yang belum berjalan optimal sebagai berikut:

1. Perlunya komunikasi dialog tatap muka yang lebih antar Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan, tidak hanya dalam komunikasi, koordinasi dan perencanaan butuh lebih dialog tatap muka agar dalam perencanaanya tidak terhambat dan kolaborasi berjalan optimal
2. Penambahan kuantitas atau jumlah pegawai lapangan sesuai dengan kebutuhan dari ruang terbuka hijau itu sendiri, tidak hanya penambahan kuantitas, namun juga pemerataan pegawai lapangan juga perlu diperhatikan karena ada beberapa sektor ruang terbuka hijau yang terlambat dan kurang diperhatikan, serta perlunya penambahan kelengkapan fasilitas umum di beberapa ruang terbuka hijau lain karena hanya sektor tertentu yang memiliki fasilitas dan dikelola yang lebih baik yakni Alun-alun kota, pemerataan tidak hanya dalam jumlah SDM namun juga kelengkapan fasilitas perlu lebih diperhatikan. Penambahan anggaran dan alat dari pemerintah juga diperlukan karena *stakeholder* yang terlibat masih memiliki rasa ketergantungan karena keterbatasan sumber daya dan hanya dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan dana CSR dari pihak swasta atau bank dirasa kurang.
3. Perlu adanya dukungan dari pihak lain untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memperkuat akan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Dukungan ini dapat berbentuk sosialisasi atau dapat juga berbentuk program yang sifatnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi
4. Merancang strategi baru dengan membuat forum diskusi diluar pelaksanaan forum inti yang melibatkan pemerintah daerah, swasta akademisi dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang berfungsi penunjang ruang terbuka hijau

dan melakukan alih fungsi lahan sebagai bentuk penambahan kuantitas dari ruang terbuka hijau